



**LAMPIRAN**

## **Lampiran 1-Daftar Pertanyaan Wawancara**

### **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011:**

1. Komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama.
  - a) Komunikasi timbal balik antara instansi yang terencana untuk ciptakan saling pengertian
    - 1) Untuk melaksanakan tugas kehumasan, instansi/OPD mana saja yang diajak berkoordinasi secara timbale balik?
    - 2) Koordinasi yang dilakukan untuk apa saja?
    - 3) Apakah ada kendala? Bila ada, apa solusinya?
    - 4) Apa di Wonosobo sudah terbentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)? Bila ada, bagaimana struktur dan tugas-tugas nya selama ini?
  - b) Komunikasi timbale balik antara instasi dan publik yang terencana untuk ciptakan saling pengertian
    - 1) Dalam komunikasi dengan masyarakat apakah target yang hendak dicapai?
    - 2) Apa saja komunikasi timbale balik yang telah dilakukan dengan masyarakat?
    - 3) Komunikasi timbale balik dengan masyarakat menggunakan media apa saja? (mohon disebutkan misal, media sosial, tradisional, dll)
    - 4) Bagaimana respon masyarakat terhadap komunikasi timbal balik yang telah dilakukan?
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik
  - a) Meningkatkan kelancaraan arus informasi
    - 1) Informasi apa saja di tahun 2021-2022 ini yang disediakan untuk masyarakat?
    - 2) Apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus informasi?

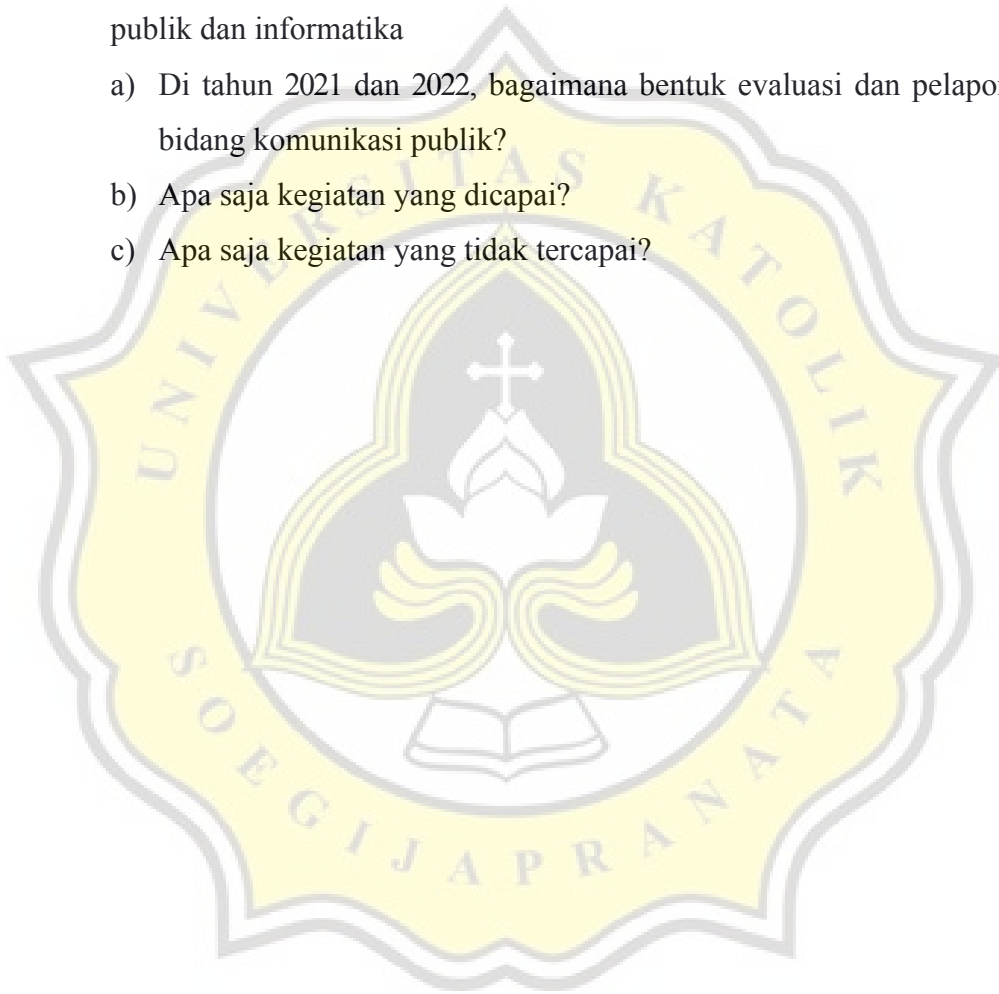
- 3) Hasil apa yang di dapat dalam meningkatkan kelancaran arus informasi?
  - 4) Kendala apa yang dialami dalam meningkatkan kelancaran arus informasi tersebut?
  - 5) Jika ada kendala bagaimana solusi dari kendala tersebut untuk tetap meningkatkan kelancaran arus informasi?
- b) Aksesibilitas Publik
- 1) Apa saja usaha yang dilakukan agar masyarakat/public mudah mengakses informasi publik?
  - 2) Bagaimana tugas PPID Utama Kab Wonosobo guna meningkatkan akses informasi publik? (perlu struktur, personil dan tugas PPID Utama Wonosobo)
  - 3) Adakah kendala melaksanakan akses informasi publik? Bila ada, ada solusinya?
  - 4) Bagaimana gambaran masyarakat memanfaatkan akses informasi publik?
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah
- 1) Di Tahun 2021-2022, apa saja isi dan bentuk kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo yang disebarluaskan ke instansi/OPD?
  - 2) Untuk menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo ke instansi/OPD, bagaimana koordinasi yang dilakukan?
  - 3) Adakah kendala untuk menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo ke instansi/OPD? Bila ada, bagaimana solusinya?
  - 4) Di Tahun 2021-2022, apa saja isi dan bentuk kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo yang disebarluaskan ke masyarakat?
  - 5) Untuk menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo ke masyarakat, bagaimana koordinasi yang dilakukan?
  - 6) Adakah kendala untuk menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo ke masyarakat? Bila ada, bagaimana solusinya?
4. Membangun citra dan reputasi positif

- a) Citra
  - 1) Apa target citra yang hendak di capai?
  - 1) Apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan citra di masyarakat?
  - 2) Bagaimana citra Pemerintah Kabupaten Wonosobo di masyarakat?
- b) Reputasi
  - 1) Adakah progam atau kebijakan khusus yang dilaksanakan secara internal instansi yang ditujukan untuk meningkatkan reputasi instansi?
  - 2) Bagaimana reputasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo di masyarakat?

**Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 5:**

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik dan informatika serta kesekretariatan
  - a) Bagaimana proses perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik?
  - b) Di tahun 2021 dan 2022, kebijakan teknis apa saja di bidang informasi komunikasi publik?
  - c) Di tahun 2021 dan 2022, apa saja progam dan kebijakan terkait di bidang informasi komunikasi publik?
  - d) Bagaimana evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik? Adakah kendala? Bila ada, bagaimana solusinya?
- 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik
  - a) Apa saja bentuk koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik yang dilakukan di tahun 2021 dan 2022?
  - b) Bagaimana cara tugas kehumasan dalam melakukan kordinasi terkait dengan kebijakan dari mulai kebijakan pusat hingga kebijakan daerah?
  - c) Bagaimana mekanisme perencanaan progam untuk memenuhi tugas kehumasan di Diskominfo?

3. Pelaksanaan Kebijakan di bidang informasi publik
  - a) Apa saja kebijakan di bidang informasi publik di tahun 2021 dan 2022?
  - b) Siapa yang memiliki wewenang menyampaikan informasi kepada masyarakat?
  - c) Adakah kendala yang dihadapi? Bila ada, bagaimana solusinya?
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika
  - a) Di tahun 2021 dan 2022, bagaimana bentuk evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik?
  - b) Apa saja kegiatan yang dicapai?
  - c) Apa saja kegiatan yang tidak tercapai?



## Lampiran 2-Verbatim Wawancara

**Wawancara 1 dengan Ibu Aldiana, S.STP, sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kamis, 10 November 2022 Pukul 15.00 WIB, di Lt. 2 Kantor Diskominfo Kabupaten Wonosobo  
Tugas Humas Menurut PERMENPAN 30/2011:**

1. Komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama.

a) Komunikasi timbal balik antara instansi yang terencana untuk menciptakan saling pengertian

1) Untuk melaksanakan tugas kehumasan, instansi/OPD mana saja yang diajak berkoordinasi secara timbal balik?

“Dalam kaitan untuk membina hubungan timbal balik antara pemkot, Diskominfo dibantu oleh semua dinas atau unit, meskipun ada dinas-dinas yang perannya lebih banyak dari pada dinas yang lain. Semua unit yang berada di pemerintah kabupaten juga berinteraksi dan bekerja sama dengan diskominfo. Ada porsi kerja samanya yang lebih banyak dibanding yang lain yaitu bagian protokoler dan komunikasi pimpinan.”

2. Koordinasi yang dilakukan untuk apa saja?

“Ada koordinasi dalam konteks harian seperti mengkonsolidasikan kegiatan teknis, peliputan yang harus kita tangani dalam konteks harian kemudian distribusi tugas dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya yang lebih penting yaitu konsolidasi secara umum jadi seperti isu-isu besar apa yang akan di

angkat oleh PemKab, kemudian strategi personal branding apa yang harus kita laksanakan untuk Bupati dan Wakil Bupati, untuk hal semacam itu lebih ke proses koordinasi. Beberapa jajaran Diskominfo bertemu dengan jajaran Prokodik untuk kita mendiskusikan bersama isu-isu penting. Ada yang insidental ada yang memang awal tahun atau pertengahan tahun kita saling mengevaluasi. Dalam satu tahun ini misalnya kita berdiskusi apa yang harus kita jual dari sisi PemKab?, Apa yang harus dibagi rata antara tugasnya antar protokoler diskominfo?, misalnya untuk akhir tahun seperti ini. Regional branding apa yang harus kita lakukan untuk menutup akhir tahun?, Kita menutup akhir tahun ini dengan kalaedoskop total dan *highlight* apa yang penting. Jadi ada dua koordinasi, ada koordinasi substansial itu bias dilakukan periodic, bulanan atau semesteran atau insidental atau memang ada koordinasi praktis harian yang memang kita lakukan melalui grup Whatsapp.”

3. Apakah ada kendala? Bila ada, apa solusinya?

“Kendalanya adalah perspektif atau cara pandangnya sedikit berbeda. Misalnya seperti sama-sama ingin menonjolkan sesuatu dalam menjalankan misi itu berbeda. Prokompin yang mungkin lebih banyak mendampingi, melayani, megorganisasi, menangani jadwal dan agenda agenda bupati, jadi lebih kepada fungsi itu. Prokompin lebih mengarah kepada subjeknya atau bupati sedang kandis kominfo perspektifnya sedikit berbeda fungsi humasnya lebih mengarah dan mengaitkan dengan visi

daerah, atau program unggulan Pak Bupati dan Wakil Bupati seperti yang terdapat pada RPJMD.

Solusinya :negosiasi, diskusi, mediasi”

4. Apa di Wonosobo sudah terbentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)? Bila ada, bagaimana struktur dan tugas-tugas nya selama ini?

“Belum ada peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang hal ini.”

- b) Komunikasi timbale balik antara instansi dan publik yang terencana untuk ciptakan saling pengertian

- 1) Dalam komunikasi dengan masyarakat apakah target yang hendak dicapai?

“Secara statistik kita tidak menerapkan target tertentu. Hasil dari kehumasan adalah pemahaman dari masyarakat terhadap pemerintah daerah, Bupati dan jajarannya. Masyarakat dapat mengerti memahami dan dapat menerima dan mendukung pembangunan. Targetnya outputnya pertama adalah penjangkauan masyarakatnya seperti apa?,berapa dan siapa saja yang menjangkau informasi yang kita infokan, *feedbacknya* adalah ketika semakin banyaknya feedback baik positif maupun negative terhadap informasi itu berarti itu menjadi target kedua. Hal ini menandakan informasi kita sampai direspon. Target terakhirnya itu munculnya



aksi Lembaga dan masyarakat yang mendukung program pemerintah.”

- 2) Apa saja komunikasi timbale balik yang telah dilakukan dengan masyarakat?

“Kalau secara *online* :Jagongan Bupati, Poadcast, Talkshow radio, acara acara formal maupun informal lainnya. Kalau secara interaksi langsung yaitu diskusi atau dialog public dengan pak bupati atau dengan OPD langsung, Forum Komunikasi Publik.”

- 3) Komunikasi timbale balik dengan masyarakat menggunakan media apa saja? (mohon disebutkan missal, media social, tradisional, dll)

“Medianya seperti medsos, jadi kita ada satu kanal yaitu kanal pengaduan, dan bias dibilang komunikasi antara pemerintah dan warga. Jadi satu media komunikasi elektronik, media sosial: Instagram Facebook, Twitter, WhatsApp untuk kanal pengaduannya, radio

Tradisionalnya: Forum Komunikasi Media Tradisional, Kelompok Informasi Masyarakat.”

- 4) Bagaimana respon masyarakat terhadap komunikasi timbal balik yang telah dilakukan?

“Baik, tetapi terkadang masih juga yang belum memahami

5. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik

- a) Meningkatkan kelancaraan arus informasi

1) Informasi apa saja di tahun 2021-2022 ini yang disediakan untuk masyarakat?

“Yang sesuai dengan ketentuan daftar informasi publik yang di tetapkan setiap tahunnya dengan keputusan bupati dan sesuai dengan standar Perki no 1 tahun 2021, jadi disitu sudah ada mandatnya setiap daerah itu harus menyampaikan informasi public apa saja dan kita memenuhi semua kaidah itu.”

2) Apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus informasi?

“Memelihara dari system informasi itu sendiri karena kita menggunakan website, kita menggunakan media social berarti kita pertama memelihara produktifitasnya, artinya websitenya, medsosnya komunikasinya harus tetap hidup dan harus tetap produktif dan harus ada konten. Yang kedua mengantisipasi keamanan informasi.”

3) Hasil apa yang di dapat dalam meningkatkan kelancaran arus informasi?

“Kalau dari segi menjaga produktifitas jelas kita adalah adanya jadwal konten baik itu website maupun konten media sosial, mana yang bulanan dan mana yang harian. Yang kedua dari upaya menjaga keamanan informasi tadi hasilnya tingkat ketahanan kanal-kanal kita terhadap serangan hacker”

4) Kendala apa yang dialami dalam meningkatkan kelancaran arus informasi tersebut?

“Ada risiko eksternal dan internal. Adapun risiko eksternalnya yaitu pastinya harus ada yang mengendalikan dan mengevaluasi jadwal konten. Kadang jadwal konten sudah ada namun kemudian tidak dilaksanakan berarti kemudian harus ada yang memantau, mengendalikan apakah jadwal kontennya itu berjalan atau tidak sesuai dengan rencana. Untuk yang kedua menjaga keamanan lebih ke faktor eksternal karena apapun platformnya semua orang bias ngehack kapanpun dan dimanapun.”

- 5) Jika ada kendala bagaimana solusi dari kendala tersebut untuk tetap meningkatkan kelancaran arus informasi?

“Jawabannya sama seperti yang sebelumnya jadi kalau yang pertama kuncinya ada di pengendaliannya itu harus ada editor yang mengendalikan kalau yang kedua menjaga keamanan informasi adalah melakukan backup, dan melakukan upaya “Present test” sebuah upaya mengujicoba system atau platform digital yang kita punya dicoba di *hack* yang kedua kita merancang CSIRT (Cyber Security Incident Team) tim untuk merespon insiden keamanan cyber.”

b) Aksesibilitas Publik

- 1) Apa saja usaha yang dilakukan agar masyarakat/public mudah mengakses informasi publik?

“Memperluas dan mempermudah, jika kita melihat dari perspektif mereka yaitu dengan memperbanyak platform media social yaitu

memasang disemua kanal. Lapor bupati dari Website, media social kita penuh. Karena Perspektif mudah bagi setiap orang berbeda beda kalau untuk usia 50 tahun keatas lebih mudah kalau Facebook saja tetapi kalau untuk generasi X misalnya Instagram aja. Kalau bicara disabilitas, mencoba mengembangkan beberapa platform seperti website adalaman disabilitas misalnya dari sisi warna suara pendukung untuk tuna netra dan sebagainya.”

- 2) Bagaimana tugas PPID Utama Kab Wonosobo guna meningkatkan akses informasi publik? (perlu struktur, personil dan tugas PPID Utama Wonosobo)

“Tugas dasar menyediakan informasi public sesuai dengan ketentuan informasi public seperti kesediaan informasi berkala, ketersediaan informasi setiap saat dan sebagainya. Yang kedua memperbanyak kanal-kanal akses informasi publik, seperti website dan medsos, yang ketiga mensosialisasikan kanal-kanal media sosial dan ini menjadi tantangan karena tidaksemua orang tau.”

- 3) Adakah kendala melaksanakan akses informasi publik? Bila ada, ada solusinya?

“Menggerakan PPID pelaksana. Kalau kendala dari sisi internal tidak semua PPID pelaksana memiliki performa kinerja yang sama. PPID utama sebenarnya tidak bias apa-apa jika tidak dibantu dengan PPID Pelaksana, karena informasi utamanya ada di PPID pelaksana

solusinya: harus rutin melaksanakan konsolidasi dengan mereka 2 bulan atau 3 bulan sekali.”

4) Bagaimana gambaran masyarakat memanfaatkan akses informasi publik?

“Kalau dari analisa media dan gambaran usia banyak jangkauan usia dari 25 – 34 tahun yang mengakses. Ada satu fakta yaitu kita sudah mengoptimalkan media elektronik tetapi ketika kita datang kelapangan kepedesaan ketika kita crosscheck informasi ini dan itu, mereka tidak tahu. Sehingga untuk wilayah Wonosobo sendiri kita merasa engagement terbesar adalah dengan komunikasi langsung masyarakat langsung. Karena berada di pedesaan dan literasi rendah lebih efektif menggunakan seperti poster dan komunikasi secara langsung.”

6. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah

a) Di Tahun 2021-2022, apa saja isi dan bentuk kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo yang disebarluaskan ke instansi/OPD?

“Sangat banyak bias dilihat di Instagram Wonosobo Hebat. Sehari saja kita bias menyebarkan dua kebijakan ke OPD. Mungkin sehari bisa 5-10 kebijakan. Informasi ini macam-macam seperti undangan rapat, program, peraturan bupati.”

b) Untuk menyebarkan kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo ke instansi/OPD, bagaimana koordinasi yang dilakukan?

“Melalui rapat, diskusi, diskusi online, WA Group, Koordinasi, dari yang riil maupun virtual baik lingkup yang setara, lebih tinggi, maupun yang lebih bawah, kami menghadap sekretaris daerah, bupati dan wakil bupati, maupun kami mengumpulkan orang-orang dan OPD untuk diajak ikut rapat”

- c) Adakah kendala untuk menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo ke instansi/OPD? Bila ada, bagaimana solusinya?

“Kendalanya waktu, kejelasan atau kendala maninfromasi, informasi yang kita sampaikan tidak langsung dimengerti oleh perangkat daerah yang lain.

Solusinya: mengulangi, mengedukasi, mengirimkan file ke WA grup”

- d) Di Tahun 2021-2022, apa saja isi dan bentuk kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo yang disebarluaskan ke masyarakat?

“Informasi yang disebarkan melalui media poster, stiker, kalender yang berisi galeri atau foto kegiatan dan beberapa informasi tentang kebijakan. Kelompok kedua medianya melalui lagu musik, jingle iklan di radio. Kelompok ketiga melalui media di internet Video yang diolah dan disebarkan melalui akun Youtube pemerintah kabupaten.”

- e) Untuk menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo ke masyarakat, bagaimana koordinasi yang dilakukan?

“Pertama ada pembahasan pada tingkatan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang tujuannya melakukan penyebaran informasi. Koordinasi terkait pelaksanaan event tersebut yang berkaitan dengan

berbagai lembaga. Diskominfo bekerjasama dengan dinas bagian sekda bahkan Lembaga Lembaga pemerintah lainnya. Yang ketiga setelah selesai kita mengevaluasi”

- f) Adakah kendala untuk menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Kab Wonosobo ke masyarakat? Bila ada, bagaimana solusinya?

“Pasti ada, Pada tahapan komunikator penyampaian pesannya belum sempurna, pada tahapan pesan-pesannya belum sampai dan belum dimengerti, yang ketiga pada tahapan komunikasi yang misalnya ada informasi agar seluruh kecamatan besok menyiapkan sepuluh program pokok PKK akan dinilai tanggal sekian. Kadang pesan itu dibaca namun tidak dilaksanakan. Hal ini juga menjadi kendala. Pada tahapan media ini menggunakan kanal digital. Misalnya ada informasi aplikasi ini lagi *error*.

Solusinya: kita berusaha mengidentifikasi, mengevaluasi memperbaiki secara periodic sekaligus. “

## 7. Membangun Citra dan Reputasi Positif

### a) Citra

- 1) Apa target citra yang hendak di capai?

“Citra yang pertama adalah persepsi positif dari public terhadap apa yang dilakukan dari jajaran bupati pemerintah kabupaten Wonosobo. Citra ini di tunjukan dalam beberapa indikator yang pertama pada indeks kepuasan masyarakat. yang memiliki UMKM. Secara umum jika masyarakat memiliki persepsi positif yang

dilakukan pemkab. Kalau komunikasinya berhasil pesannya nyampe masyarakat paham maka masyarakat akan memiliki perspektif positif. Maka ketika ada survey tentang layanan pemkab, apakah anda puas dengan layanan pemkab?, maka jawabannya akan cenderung positif, dan sebaliknya

Yang kedua dalam Tindakan yang lebih konkret lagi. Masyarakat berperilaku atau bertindak, berucap, atau melakukan sesuatu yang seirama dengan apa yang dilakukan pemkab. Misalnya contoh Pak bupati mengatakan masyarakat aktifkan lagi siskamling karena banyak begal. Masyarakat melaksanakannya arahan informasi tersebut. Hal ini menunjukkan masyarakat yang memiliki satu pemahaman dengan pemerintah dan ikut serta bersinergi dengan pemerintah. “

2) Apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan citra di masyarakat?

“Publikasi ,perbanyak ruang-ruang dialog, mempromosikan apa yang dilakukan pemerintah mengemasinformasi secara interaktif, yang paling penting memperbaiki kinerja layanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. “

3) Bagaimana citra Pemerintah Kabupaten Wonosobo di masyarakat?

“Kami beranggapan bahwa masyarakat sekarang mulai memiliki citra yang bagus terhadap pemerintah“

b) Reputasi

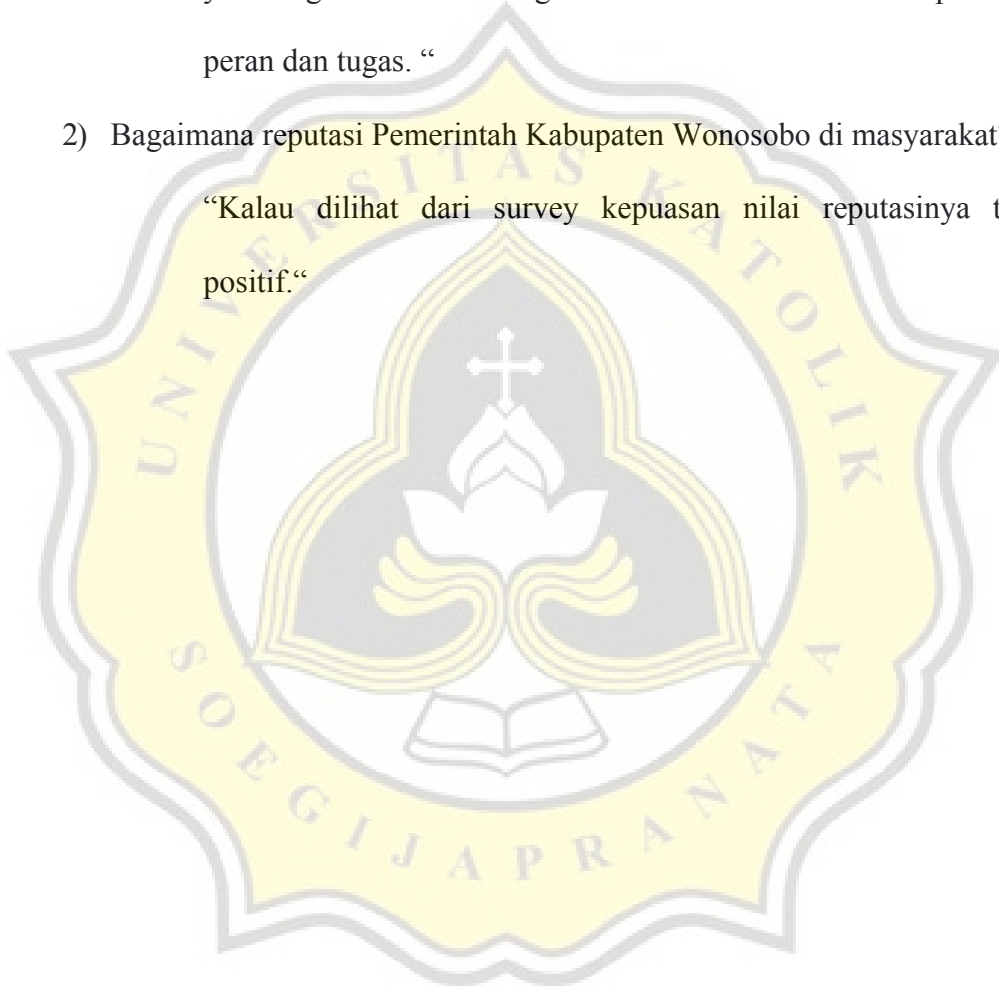


1) Adakah program atau kebijakan khusus yang dilaksanakan secara internal instansi yang ditujukan untuk meningkatkan reputasi instansi?

“Mengelola kanal, memperbanyak ruang dialog. Di internal sendiri yaitu bagaimana kita mengatur tatakelola internal dalam pembagian peran dan tugas. “

2) Bagaimana reputasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo di masyarakat?

“Kalau dilihat dari survey kepuasan nilai reputasinya tinggi, positif.“



### **PERBUP Lampiran 3**

**Wawancara 2 dengan Bapak Taufik Hidayat, S.I.P., sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Rabu, 11 November 2022 Pukul 09.00 WIB, di Lt. 2 Kantor Diskominfo Kabupaten Wonosobo**

**Tugas Humas Menurut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 5:**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi publik dan informatika serta kesekretariatan

a) Bagaimana proses perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik?

“Yang jelas itu dirumuskan oleh pejabat struktural di dinas Diskominfo, untuk waktunya adalah dilaksanakannya pada satu tahun sebelumnya. “

b) Di tahun 2021 dan 2022, kebijakan teknis apa saja di bidang informasi komunikasi publik?

“Kurang lebih sama yaitu memperluas akses masyarakat, meningkatkan produktifitas konten, berkolaborasi dengan beberapa stakeholders atau penggiat komunikasi lainnya. Kalau dari segi kebijakan teknisnya yaitu memperbanyak konten. “

c) Di tahun 2021 dan 2022, apa saja progam dan kebijakan terkait di bidang informasi komunikasi publik?

“Dapat dilihat di link Renja, disitu terdapat nama-nama program. Ada program pengelolaan informasi publik, ada program kerjasama media itu terdapat di renja Diskominfo.”

d) Bagaimana evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik? Adakah kendala? Bila ada, bagaimana solusinya?

“Ada evaluasi bulanan untuk mengevaluasi bulanan untuk mengevaluasi program kegiatan, ada evaluasi tahunan untuk kebijakan.

Kendalanya lebih ke kita saat evaluasi membutuhkan data dan riset-riset dari sisi yang berbeda. Misalnya ketika kita mengevaluasi internal kita butuh evaluasi dari pihak lain.

Solusinya, jika kita bertemu dengan Lembaga riset apapun itu misalnya universitas. Kita menawarkan dan kita membuka evaluasi dari mereka. Kita menampung terhadap pihak luar untuk melakukan evaluasi atas kinerja kita.”

2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika

1) Apa saja bentuk koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik yang dilakukan di tahun 2021 dan 2022?

“Kita melakukan koordinasi melalui rapat koordinasi formal, rapat grup whatsapp, rapat online, lewat komunikasi antar pimpinan.”

2) Bagaimana cara tugas kehumasan dalam melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan dari mulai kebijakan pusat hingga kebijakan daerah?

“Kalau kebijakan pusat pastinya kita ikut menyebarkan, kalau kebijakan kita sendiri hampir sama. Tapi pada intinya baik itu

kebijakan pusat maupun daerah kita melakukan strategi komunikasi untuk mengkomunikasikan kebijakan tersebut. “

- 3) Bagaimana mekanisme perencanaan program untuk memenuhi tugas kehumasan di Diskominfo?

“Kita mengikuti mekanisme perencanaan daerah. Setiap tahun kami membuat dan menyusun program reencanaan kerja.”

3. Pelaksanaan Kebijakan di bidang informasi publik

- 1) Apa saja kebijakan di bidang informasi publik di tahun 2021 dan 2022?

“Memperluas akses masyarakat, meningkatkan produktivitas konten, berkolaborasi dengan beberapa stakeholders atau penggiat komunikasi lainnya.”

- 2) Siapa yang memiliki wewenang menyampaikan informasi kepada masyarakat?

“Semua perangkat daerah di mekanisme Pemkab ini memiliki kewenangan untuk menyebarkan informasi karena mereka juga anggota PPID.”

- 3) Adakah kendala yang dihadapi? Bila ada, bagaimana solusinya?

“Performanya PPID tidak semuanya sesuai standar.

Solusinya, melakukan rapat pengendalian dengan PPID Pelaksana”

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika

a) Di tahun 2021 dan 2022, bagaimana bentuk evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik?

“Ada dokumen Lakib, ada dokumen LKJIP, ada dokumen LKPJ. Itu adalah dokumen-dokumen evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun oleh perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya itu. Kalau diskominfo menjalankan fungsi informatika dan komunikasi publik berarti kita ada di tiga laporan itu“

b) Apa saja kegiatan yang dicapai?

“Banyak banget, ada sekitar 17 atau 18 kegiatan. Ada di website. Kalau di IKP sendiri Cuma ada satu kegiatan namanya pengelolaan informasi publik Cuma memang ada di Daftar pelaksanaan anggaran di website“.

c) Apa saja kegiatan yang tidak tercapai?

“Ada tercantum di website”

## Lampiran 4-Dokumentasi



## Lampiran 5- Surat Tugas Penelitian

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Pevijayan Luhur VII 1, Bendan Duvur, Semarang 50234  
Telp. (024) 5441535, 5528003 (hunting) Fax. (024) 5415429 - 5445265  
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

**Unika**  
**SOEGIJAPRANATA**  
Talenta pro patria et humanitate

Nomor : 00151/B.7.3/PSIK/XI/2022  
Lamp : Proposal  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

8 November 2022

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
**Kepala DISKOMINFO KABUPATEN WONOSOBO**  
Jalan Sabuk Alu, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo,  
Kabupaten Wonosobo 56311.

Salam hormat,  
Mahasiswa tersebut di bawah adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, yakni :

Nama : SHERLY AGATYA  
NIM : 15.M1.0079  
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi,  
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata  
Telp./HP : 081225566844

Berkasus dengan kegiatan penelitian tugas akhir pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Unika Soegijapranata, mahasiswa tersebut tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik **"PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO"**.

Kami berharap, bahwa mahasiswa tersebut diizinkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian guna kelengkapan data, dengan melakukan penggalan data, sesuai dengan proposal yang terlampir.

Kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada :  
Waktu : Tgl. 7-14 November 2022  
Lokasi : **Kantor Diskominfo Kabupaten Wonosobo**

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Demikian kami,  
Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Unika Soegijapranata  
Prof. Dr. Agus S. K. D., S.I.Kom., M.A.

## Lampiran 6-Hasil Plagscan

**Similarity Report**

---

PAPER NAME  
**bab 1 - bab 5\_15m10079.docx**

---

WORD COUNT <b>8656 Words</b>	CHARACTER COUNT <b>59868 Characters</b>
PAGE COUNT <b>55 Pages</b>	FILE SIZE <b>1.9MB</b>
SUBMISSION DATE <b>Dec 12, 2022 10:42 AM GMT+7</b>	REPORT DATE <b>Dec 12, 2022 10:43 AM GMT+7</b>

---

● **19% Overall Similarity**  
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 10% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

